

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara

Fina Nur Syarifah^{1*}, Hilda Dwi Cahyani², Intan Nisrina Kamilah³,
Gunawan Santoso⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Muhamadiyah Jakarta

*Corresponding email: fiinanurssl@gmail.com

Abstrak - Demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan dalam sebuah negara melainkan juga sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Selain itu, dalam konsepsi demokrasi terdapat keberadaan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Namun dalam prakteknya, demokrasi belum dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita memerlukan upaya untuk dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dan dapat mewujudkan hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan dirasa dapat menjadi salah satu upaya yang sangat menjanjikan dan efektif. Beberapa ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan dan model pembelajarannya yaitu; pemahaman nilai kesatuan dan persatuan pada kajian materi integrasi nasional, pembelajaran demokrasi pada kajian materi konstitusi negara, pembelajaran kewajiban dan hak warga negara, pembelajaran resolusi konflik pada kajian materi praksis demokrasi dan praktik pemecahan masalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata kunci: Pendidikan kewarganegaraan, Demokrasi

Abstract - Democracy is not just a form of government in a country but also a way of life for a nation. In addition, in the conception of democracy there are human rights. Therefore, democracy and human rights cannot be separated and have become one unit. But in practice, democracy cannot be realized in everyday life. Therefore, efforts are needed to realize a democratic life and realize human rights. Citizenship education is perceived as one of the most promising and effective efforts. Some of the scope of Citizenship Education materials and their learning models are; understand the value of unity and oneness in studying national integration material, studying democracy in studying state constitutional material, studying the obligations and rights of citizens, studying conflict resolution in studying democratic praxis materials and practice problem solving through learning Citizenship Education.

Keywords: Civic education, Democracy

Pendahuluan

Negara demokrasi adalah negara yang berbentuk atau bermekanisme sistem pemerintahan untuk menggapai kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang diciptakan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. Suasana kehidupan yang demokratis adalah dambaan bagi umat manusia, dimana seluruh hak dan kewajiban warga negaranya akan terwujud, maka dari itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan cita-cita bangsa, maka harus dimulai dengan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pendidikan kewarganegaraan bukanlah sesuatu



yang baru di dalam konteks pendidikan Indonesia. Telah banyak perubahan yang dilakukan baik konteks maupun istilah oleh Pemerintah RI untuk mewujudkan misinya dalam membangun pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Zamron (dalam Srikanto dan Fauzi, 2013 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang tujuannya untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang dapat menumbuhkan kesadaran pada generasi anyar bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak hak warga masyarakat. Selain itu, (Nurul dan Safari, 2017 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai nilai hak dan kewajiban warga negara agar setiap hal sesuai dengan cita cita bangsa.

Demokrasi adalah prinsip dasar yang mendasari sistem pemerintahan di banyak negara di dunia saat ini. Untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, penting bagi warga negara untuk memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, prinsip, dan proses demokrasi. Inilah mengapa pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting sebagai wawasan demokrasi bagi warga negara. PKn bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Untuk mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan cita cita bangsa, maka harus dimulai dengan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pendidikan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang baru di dalam konteks pendidikan Indonesia. Telah banyak perubahan yang dilakukan baik konteks maupun istilah oleh Pemerintah RI untuk mewujudkan misinya dalam membangun pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Zamron (dalam Srikanto dan Fauzi, 2013 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang tujuannya untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang dapat menumbuhkan kesadaran pada generasi anyar bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak hak warga masyarakat. Selain itu, (Nurul dan Safari, 2017 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai nilai hak dan kewajiban warga negara agar setiap hal sesuai dengan cita cita bangsa.

Pemaknaan demokrasi di Indonesia belum terealisasikan sepenuhnya, hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi karena adanya rasa kebebasan terhadap sesuatu yang bersifat fundamental, seperti hak untuk memperoleh dan memberikan informasi. Demokratisasi sangat menyoroti kebebasan dalam berkarya, berekspresi dalam ruang sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, berpendapat, dll. Namun, menurut Robert Dahl hal yang paling menentukan demokrasi pada suatu negara adalah dimana masyarakatnya mampu menerapkan kebebasan kebebasan yang bersifat fundamental seperti yang telah dijelaskan diatas dengan baik dan benar, sehingga tidak akan terjadi konflik konflik yang akan merusak ketertiban dan citra bangsa. Indonesia merupakan negara yang minim akan pengalaman berdemokrasi maka akan selalu ada ”percobaan-percobaan” yang kerap kali jatuh bangun sehingga hal ini akan sangat tergantung dengan kesabaran semua pihak baik oleh pemerintahan maupun masyarakatnya. Demokratisasi bangsa merupakan proses panjang yang akan sangat melelahkan, maka kita perlu upaya upaya yang mempercepat bangsa Indonesia untuk berdemokrasi, salah satunya adalah jalan pendidikan. Perjuangan menegakkan demokrasi adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi diyakni sebagai sistem politik dan pandangan hidup yang dapat menjamin penghargaan atas hak dasar manusia yang selanjutnya memberi perlindungan dan penegakkan terhadap hak dasar tersebut. Maka, unsur pokok dari sebuah demokrasi adalah perwujudan dari pengakuan akan hak asasi manusia.

Misi pendidikan yang paling mendasar adalah menjadikan manusia yang seutuhnya. Manusia yang adil dan beradab antar sesamanya merupakan modal utama dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Sebagaimana tecantum pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Melalui pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

bertujuan untuk membangun integrasi nasional (nasionalisme) dan kesatuan dan persatuan kebangsaan di era demokrasi saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan membangun kompetensi warga negara untuk terampil menghadapi tantangan menjadi urgensi di era global saat ini. *European Education Council* (LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T, 2019) memaparkan konsep kompetensi warga negara (*civic competence*) yang perlu mengkombinasikan antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas nyata seperti keterlibatan aktif warga negara termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, refleksi kritis dan kreatif, pengambilan keputusan, tanggung jawab, penghormatan terhadap nilai-nilai lain termasuk kesadaran akan keanekaragaman dan sikap serta nilai-nilai solidaritas, hak asasi manusia, kesetaraan, dan demokrasi.

Selain itu misi pendidikan di abad 21, menurut Chris Dede (2010), “perlu disajikan sebagai pembelajaran rutin tentang keterampilan pemecahan masalah (*a specific problem solving routine*) dalam berbagai pendekatan situasi dengan upaya membangun kemampuan dalam interpretasi kelompok, negosiasi makna bersama, dan merekonstruksi sebuah resolusi masalah (*co-construction of problem resolutions*)”. Selain itu pada era demokrasi, menurut Bunyamin Maftuh (2008) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki revitalisasi dan reorientasi PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif sehingga mempengaruhi tujuan, misi, kompetensi sehingga materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warganegara yang baik dan demokratis.

Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat berkontribusi membangun kompetensi mahasiswa untuk saling menghargai dan mengolah permasalahan menjadi sebuah peluang positif dan memperkuat peluang persatuan. Melalui praktik baik dalam kegiatan kehidupan sehari-hari seperti sikap saling menghargai perbedaan pemikiran, pendapat, dan keyakinan merupakan suatu proses manusia belajar untuk menjadi warga negara yang beradab. Melalui kompetensi warga negara dalam mengolah persoalan setidaknya mampu meminimalisir konflik relasi sosial yang sering terjadi.

Metode

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. (Lasa, 2009:207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode penelitian diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, karena dalam melakukan sebuah penelitian terdiri dari beberapa langkah yang sistematis, dan mengikuti konsep ilmiah agar hasil dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian guna memperoleh dan menganalisis data agar terpenuhi syarat yang diperlukan dalam penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi

pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penelitian dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. (Darmadi, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah mata pelajaran yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontology pokok khususnya pada konsep potitical democracy untuk aspek duties and right of citizen. Menurut Somantri (2001: 299) Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang intinya demokrasi namun diperluas dengan sumber sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, serta orang tua, yang semuanya diproses untuk melatih para siswa dan mahasiswa agar dapat berpikir kritis, analitis, juga akhirnya dapat bertindak demokratis dalam rangka menyiapkan hidup yang demokratis serta berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Merphin (dalam Srikanto dan Fauzi, 2013: 1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui pendidikan yang diagonal. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter dan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundang undangan (Kurniawan, 2018 : 9).

Melalui pendidikan kewarganegaraan yang baik, keterampilan demokrasi dapat ditingkatkan. Pendidikan ini dapat melibatkan pelatihan, simulasi, diskusi, dan pengalaman praktis yang memungkinkan warga negara untuk mempraktikkan keterampilan demokrasi secara nyata. Dengan meningkatkan keterampilan demokrasi, warga negara akan lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, menghormati perspektif orang lain, dan memperkuat demokrasi dalam masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam memberikan wawasan demokrasi kepada warga negara. Ini karena PKn bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam konteks demokrasi.

Berikut adalah beberapa cara di mana PKn dapat menjadi wawasan demokrasi bagi warga negara:

1. Pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi: PKn membantu individu memahami nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, persamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pemahaman ini, warga negara dapat menghargai pentingnya demokrasi dalam masyarakat.
2. Pengetahuan tentang sistem politik: PKn memberikan pengetahuan tentang sistem politik negara dan bagaimana pemerintahan demokrasi beroperasi. Ini termasuk pemahaman tentang lembaga-

- lembaga politik, seperti pemilihan umum, partai politik, parlemen, dan kekuasaan berbagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan memahami proses politik ini, warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan keputusan politik.
3. Keterlibatan aktif dalam masyarakat: PKn mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Ini bisa meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan masyarakat, diskusi publik, dan organisasi sukarela. Dengan berpartisipasi aktif, warga negara dapat berkontribusi pada pembangunan demokrasi dan mengadvokasi isu-isu yang penting bagi masyarakat.
 4. Pemahaman tentang hak dan kewajiban: PKn mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara. Warga negara yang dilengkapi dengan pemahaman ini akan memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka, seperti hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berorganisasi. Mereka juga akan menyadari kewajiban-kewajiban mereka, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.
 5. Peningkatan keterampilan demokrasi: PKn mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, keterampilan berdebat yang konstruktif, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan bersama. Keterampilan ini memungkinkan warga negara untuk terlibat secara efektif dalam proses demokrasi dan mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat.

Dengan demikian, PKn berperan sebagai wawasan demokrasi bagi warga negara dengan memberikan pengetahuan.

Kajian ini membahas konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Melalui sub kajian tersebut pembelajaran PKn diarahkan pada dimensi menyatukan keanekaragaman (multikulturalisme) berbagai perbedaan suku, bahasa, ras dan budaya agar memiliki rasa ingin bersatu membangun solidaritas bersama. Integrasi nasional mengkaji rasionalitas bahwa suatu bangsa- negara tidak akan terwujud dan bisa terbangun apabila masyarakat didalamnya selalu memunculkan konflik sehingga sulit untuk bersatu. Pada prosesnya mahasiswa ditugaskan untuk melakukan penelusuran, menanya, meng-gali, membangun argumentasi ilmiah sekaligus mendeskripsikan kembali esensi dan urgensi integrasi nasional secara terampil secara lisan maupun tulisan.

Namun strategi penyelesaian konflik di Indonesia perlu sudut pandang kajian yang lebih komprehensif salah satunya dengan melibatkan peran vital matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi. Pendidikan Kewarganegara-raan berkaitan erat dengan pendidikan tinggi yang pada akhirnya sangat urgen sebagai wahana yang dapat mengembangkan kualitas pribadi manusia, termasuk membangun manusia sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara yang baik (*good citizen*) dan rasa saling memiliki/ nilai persatuan (*cohesi-veness*). Melalui pembelajaran integrasi nasional tersebut, luaran yang dihasilkan mahasiswa diharapkan mampu bersikap disiplin untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan relasi sosial di masyarakat. Mahasiswa mampu mengokohkan persa-tuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi dan menya-jikan dalam bentuk studi kasus urgensi integrasi nasional menjadi salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemahaman nilai kesatuan dan persatuan merupakan bagian penting dalam kajian materi integrasi nasional. Integrasi nasional merujuk pada upaya untuk mempersatukan beragam elemen dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang solid dan harmonis. Nilai kesatuan dan persatuan memainkan peran sentral dalam membangun dan mempertahankan integrasi nasional. Berikut ini adalah pemahaman nilai kesatuan dan persatuan dalam konteks kajian materi integrasi nasional:

1. Menghargai keberagaman: Nilai kesatuan dan persatuan mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dalam masyarakat. Setiap individu, kelompok, suku, agama, dan budaya memiliki kontribusi yang berharga dalam membentuk identitas nasional. Menghormati perbedaan dan memperlakukan semua elemen masyarakat dengan rasa hormat dan adil adalah prinsip utama dalam mencapai persatuan.
2. Solidaritas dan persaudaraan: Nilai kesatuan dan persatuan mendorong terciptanya ikatan solidaritas dan persaudaraan antara seluruh warga negara. Solidaritas mengacu pada semangat saling membantu dan mendukung dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersama. Persaudaraan mencerminkan rasa persatuan dan ikatan emosional yang erat antara sesama warga negara.
3. Partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik: Untuk mencapai kesatuan dan persatuan, setiap warga negara diharapkan terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui partisipasi yang aktif, warga negara dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, berbagi ide, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama.
4. Mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik: Penting bagi setiap warga negara untuk mempraktikkan dialog yang terbuka, saling mendengarkan, dan menghormati pendapat orang lain. Komunikasi yang baik memfasilitasi pemahaman, penghargaan, dan penyelesaian konflik yang damai. Dengan demikian, dialog dan komunikasi yang baik menjadi pondasi penting untuk mencapai kesatuan dan persatuan.
5. Mengutamakan kepentingan nasional: Nilai kesatuan dan persatuan mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kesadaran akan pentingnya kepentingan nasional membantu mengatasi perbedaan dan membangun visi bersama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Dalam kajian materi integrasi nasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai kesatuan dan persatuan menjadi landasan yang kuat untuk membangun solidaritas, keadilan, dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, sebuah negara dapat mencapai kestabilan, kemajuan, dan kebahagiaan bersama dalam rangka membangun bangsa yang kuat dan bersatu.

Peran konstitusi sebagai bentuk hukum tertinggi dibutuhkan dalam membe-rikan pembatasan kewenangan pemerintah atau pejabat negara, pembagian kekuasaan negara dan memberi kepastian hak asasi untuk warga negara. Dalam pembelajaran tentang konstitusi memiliki muatan materi organisasi negara, hak asasi manusia, tata cara perubahan UUD, terkadang juga terkait isi larangan untuk mengubah sifat-sifat khusus dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Seperti pada munculnya era reformasi, terkait tuntutan amandemen UUD NRI 1945 yang mengacu pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokrasi, pemberdayaan peran rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam batang tubuh UUD NRI 1945 masih ada pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran berbeda (multitafsir) dan memberikan peluang bagi penyelenggaraan tata kelola negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.

Dalam perkembangannya, tuntutan aman-demen UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia melalui agenda reformasi waktu itu. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali amandemen. Keempat kali amandemen tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan yang integral. Demokrasi sebagai sistem politik baru pasca reformasi memunculkan banyak sub-sistem unit, regulasi dan pola-pola koordinasi yang saling berkaitan. Ketika terjadi kesalahan salah satu sub-sistem tersebut dapat berdampak pada yang lainnya. Menurut Ahmad Royani (2016), Sub-sistem yang saling ketergantungan itu adalah tujuan dan nilai-nilai (*goals and values subsystem*), teknikal (*technical subsystem*), manajerial (*managerial subsystem*), psikososial (*psychosocial sub-system*), dan subsistem

struktur (*structural subsystem*). Interaksi antar komponen sistem yang telah terstruktur dengan konsep sedemikian rupa tidak menjamin terwujudnya hubungan yang selaras..

Melalui proses pembelajaran tentang konstitusi negara tersebut, maka maha-siswa wajib memiliki pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum yang patuh terhadap konstitusi. Konstitusi wajib menjadi acuan hukum bagi peraturan gukum di bawahnya serta bagi para penyelenggaran pemerintahan yang menjun-jung tinggi norma – norma hukum. Permasalahan keinginan rakyat yang meng-harapkan system demokras dengan agenda reformasi merupakan pengalaman penting bagi penyelenggaraan negara yang wajib memperhatikan nilai-nilai demo-krasi. Konstitusi negara dengan adanya amandemen empat kali mulai memperha-tikan bagaimana tata cara perubahan atau pergantian konstitusi dan perundanga-undangan yang termaktub dalam BAB XVI yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar pada Pasal 37. Dalam Pasal tersebut secara implisit warga negara dipahami bahwa resolusi konflik tidaklah perlu dilakukan dengan pendekatan anarkisme sehingga pentingnya menggunakan pendekatan hukum yang berlaku.

Pembahasan tentang demokrasi dapat dilakukan melalui pembelajaran penyelesaian masalah (*problem solving*). Mahasiswa dapat melakukan brain storming terkait adanya materi pembahasan munculnya kekuasaan pada system demokrasi yan ditandai dengan banyaknya “dinasti politik” yang seakan mampu melakukan penguasaan dari berabagai segi kehidupan masyarakat, Lembaga pemerintah, Lembaga DPR, bisnis, peradilan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh pemberdayaan kekuatan oknum kroni. Apabila system demokrasi dalam suatu negara tidak memperhatikan kedaulatan rakyat maka berpotensi terjadi adanya sistem negara oligarki. Sistem tersebut memiliki sistem kekuasaan yang buruk, yang mana kekuasaan menjadi terpusat pada sekelompok kecil penguasa, dilain itu ada Sebagian besar rakyat tidak terjamah oleh sumber-sumber kekuasaan pemerintah tersebut yang meliputi adanya keterbukaan akses pada wewenang, finansial, hukum, informasi, Pendidikan, budaya dan sebagainya.

Melalui latar belakang pembahasan fenomena tersebut maka mahasiswa akan memunculkan diskusinya sendiri. Proses kemampuan berfikir tentang mengapa kekuasaan politik pemerintah banyak dipimpin oleh segolongan partai politik yang melalui penguarnn suara rakyat untuk mendominasi perolehan kursi di DPR. Mahasiwa juga akan mendiskusikan terjadinya kondisi yang mana adanya Lembaga parlemen dengan kelompok elit dapat menamakan dirinya sebagai kelompok elit mereka sendiri yang sering bersebrangan dengan keinginan rakyat. Mahasiswa juga perlu mendiskusikan ketidakjelasan kelompok pihak masyarakat maupun di pemerintah yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berdasar pada nilai-nilai tradisi budaya, agama yang hanya ada pada beberapa orang yang ampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang pada ujungnya masyarakat menjadi korban untuk tujuan yang kelompok elit tadi inginkan sendiri sehingga tidak jelas keberadaannya di era demokrasi saat ini. Mahasiswa juga akan mendis-kusikan sekelompok kecil elit di daerah memiliki kewenangan secara formal maupun nonformal yang digunakan untuk mencatat nama aspirasi daerah demi mewujudkan kepentingan diri sendiri.

Winataputra (2014) dalam diskusi seminar nasional PKn-AP3KnI juga memaparkan pemahamannya bahwa, “secara holistik pendidikan kewarganega-raan bertujuan agar setiap warga Negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demo-krasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demo-krasi (*learning through democracy*), dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*)”.

Kajian demokrasi tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bahwa penyelesaian suatu persoalan konflik perlu dihindari dengan kemampuan para pemangku kebijakan untuk bersikap demokratis. Sikap demokratis diharapkan mampu memberikan upaya mitigasi atau pencegahan munculnya persoalan

konflik yang bisa muncul akibat terpendamnya aspirasi masyarakat di bawah sistem pemerintahan yang otoriter.

PKn juga memberikan pengetahuan tentang sistem politik dan struktur pemerintahan dalam konteks demokrasi. Warga negara belajar tentang lembaga-lembaga politik seperti pemilihan umum, partai politik, parlemen, dan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan memahami sistem politik ini, warga negara dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan politik dan mengawasi tindakan pemerintah.

Pengetahuan tentang sistem politik merupakan komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman demokrasi. Pemahaman ini melibatkan pengetahuan tentang struktur, lembaga, dan proses politik yang berlaku dalam suatu negara. Berikut ini adalah beberapa hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang sistem politik:

1. Bentuk Pemerintahan: Pengetahuan tentang sistem politik mencakup pemahaman tentang bentuk pemerintahan yang ada di negara tertentu. Ini bisa mencakup sistem demokrasi, republik, monarki, atau bentuk pemerintahan lainnya. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan karakteristik setiap bentuk pemerintahan tersebut.
2. Lembaga-Lembaga Politik: Pengetahuan tentang sistem politik melibatkan pemahaman tentang lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara. Contohnya termasuk parlemen, presiden, kabinet, pengadilan, partai politik, dan komisi-komisi pemerintah. Penting untuk memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut dalam proses pengambilan keputusan politik.
3. Proses Legislasi: Pengetahuan tentang sistem politik mencakup pemahaman tentang proses pembuatan undang-undang. Ini melibatkan pengetahuan tentang bagaimana undang-undang diusulkan, diperdebatkan, dan disahkan dalam lembaga legislatif. Pemahaman tentang proses legislasi membantu warga negara untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan mengapa penting untuk terlibat dalam proses tersebut.
4. Pemilihan Umum: Pengetahuan tentang sistem politik juga melibatkan pemahaman tentang pemilihan umum. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pemilihan umum diadakan, proses pemilihan kandidat, sistem pemilihan, dan peran warga negara dalam proses tersebut. Pemahaman tentang pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam memilih perwakilan mereka dan mempengaruhi proses politik.
5. Partai Politik: Pengetahuan tentang sistem politik melibatkan pemahaman tentang peran partai politik dalam sistem politik. Ini termasuk pemahaman tentang perbedaan antara partai politik, ideologi yang mereka anut, dan bagaimana partai politik berpartisipasi dalam proses politik. Pemahaman tentang partai politik membantu warga negara dalam memilih dan memahami platform politik yang disajikan oleh setiap partai.

Pemahaman tentang sistem politik membantu warga negara dalam memahami bagaimana negara mereka diatur dan bagaimana proses politik berjalan. Hal ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, mempengaruhi kebijakan publik, dan berkontribusi dalam pembangunan demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting sebagai wawasan demokrasi bagi warga negara. PKn berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi, nilai-nilai demokratis, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan demokratis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa PKn penting sebagai wawasan demokrasi:

1. Pemahaman tentang demokrasi: PKn membantu individu memahami konsep dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, persamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan pemahaman ini, warga negara dapat menghargai pentingnya demokrasi dalam menjaga kebebasan individu dan masyarakat yang adil.
2. Kesadaran akan hak dan kewajiban: PKn mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara. Warga negara yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan akan mengetahui hak-hak

- mereka, seperti hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat. Mereka juga akan menyadari kewajiban mereka, seperti mematuhi hukum, berpartisipasi dalam proses demokratis, dan menjaga keutuhan negara.
3. Pengembangan keterampilan demokratis: PKn membantu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis. Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, kemampuan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, keterampilan berdebat yang konstruktif, dan kemampuan bekerja sama dalam mengambil keputusan bersama. Keterampilan ini memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat, dan menghargai keragaman pendapat dalam masyarakat.
 4. Partisipasi politik yang aktif: PKn mendorong partisipasi politik yang aktif dan sadar dalam kehidupan demokratis. Melalui PKn, individu diajarkan tentang pentingnya terlibat dalam pemilihan umum, berkontribusi dalam kegiatan politik, dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan yang berdampak pada masyarakat. PKn juga mempromosikan partisipasi dalam organisasi masyarakat dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan mereka.
 5. Pemahaman tentang sistem politik: PKn memberikan pengetahuan tentang sistem politik dan struktur pemerintahan dalam konteks demokrasi. Warga negara yang memiliki pemahaman ini akan lebih mampu memahami bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan, bagaimana lembaga-lembaga pemerintah beroperasi, dan bagaimana pengambilan keputusan politik dilakukan. Hal ini memungkinkan warga negara untuk mengkritisi, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses politik secara efektif.

Melalui pendidikan kewarganegaraan yang baik, warga negara dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi, nilai-nilai demokratis, hak-hak dan kewajiban, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. PKn berperan sebagai wawasan demokrasi yang membantu membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.

PKn mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, kemampuan mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, keterampilan berdebat yang konstruktif, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan bersama. Dengan keterampilan ini, warga negara dapat terlibat secara efektif dalam proses demokrasi, mengatasi perbedaan pendapat, dan mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat.

Peningkatan keterampilan demokrasi adalah aspek penting dari pendidikan kewarganegaraan. Keterampilan demokrasi mengacu pada kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan demokratis. Berikut adalah beberapa keterampilan demokrasi yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan:

1. Berpikir Kritis: Keterampilan berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang relevan. Dalam konteks demokrasi, keterampilan ini memungkinkan warga negara untuk memahami isu-isu kompleks, mengenali manipulasi politik, dan membuat keputusan yang rasional.
2. Kemampuan Berkomunikasi: Komunikasi yang efektif merupakan keterampilan penting dalam demokrasi. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan dengan empati, dan terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Melalui komunikasi yang baik, warga negara dapat berbagi ide, membangun konsensus, dan mengatasi perbedaan pendapat dalam kehidupan politik.
3. Keterampilan Debat: Keterampilan debat melibatkan kemampuan untuk menyusun argumen yang logis, mempertahankan pandangan dengan bukti yang kuat, dan merespons dengan baik.

- terhadap argumen lawan. Keterampilan ini memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam perdebatan publik, mengemukakan pandangan mereka, dan mempengaruhi opini masyarakat.
4. Keterampilan Kerjasama: Kerjasama yang efektif adalah keterampilan penting dalam demokrasi yang melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Melalui keterampilan ini, warga negara dapat membentuk kelompok advokasi, partisipasi dalam inisiatif masyarakat, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan sosial dan politik.
 5. Pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia: Pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia adalah keterampilan demokrasi yang penting. Ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, keadilan, dan sistem hukum dalam konteks demokrasi. Dengan memahami hukum dan hak asasi manusia, warga negara dapat melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka serta mendorong keadilan dalam masyarakat.
 6. Keterlibatan Sipil: Keterlibatan sipil adalah keterampilan untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial. Ini meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan masyarakat, demonstrasi damai, dan kampanye politik. Dengan keterlibatan sipil, warga negara dapat menyuarakan kepentingan mereka, mempengaruhi kebijakan publik, dan membangun kekuatan kolektif dalam masyarakat.

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam memberikan wawasan demokrasi kepada warga negara. PKn membantu membangun pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, pengetahuan tentang sistem politik, keterlibatan aktif dalam masyarakat, pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta pengembangan keterampilan demokrasi. Dengan demikian, PKn berkontribusi pada pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, sadar, dan aktif dalam membangun dan menjaga demokrasi dalam masyarakat.

Referensi

- Toto Sugiarto (2020) *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi*. Channel youtube racit etutorial wab: https://youtu.be/UWICb_9SxFA (diakses tanggal 8 Juni 2022)
- Bhakti Wiyata. Kurniawan. M. I., (2018). *Buku ajar konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar*. Sidoarjo : Umsida Press.
- Berlian Roja Khalda, (2021). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No, 2
- Bunyamin Maftuh. (2008). *Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan*. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144
- Dede, C. (2010). *Comparing frameworks for 21st century skills*. *21st century skills: Rethinking how students learn*, 20, 51-76.
- Fauzi, I., Srikanto., (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jember : Superior.
- LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T. (2019). *Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data*. *The Journal of Social Studies Research*, 1-11
- Royani, A. (2016). *Manajemen Konflik*. *EDUKASI*, 7(1). 1-26
- Sugara Harry, (2022). *Jurnal Koulutus: Jurnal Pendidikan Kahuripin* Vol 5, No 1
- Winataputra, U.S. (2014). *Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bahan Diskusi dalam Semnas PKn-AP3KnI.